

HEGEMONI KEKUASAAN DALAM NOVEL 86 KARYA OKKY MADASARI

Ilham Bagus Pangestu, Suparmin, Titik Sudiatmi

Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara

Sukoharjo

ilhambaguspangestu456@gmail.com

ABSTRAK: Teori hegemoni Gramsci memberikan pengaruh terhadap studi sastra. Sastra tidak hanya dipandang sebagai gejala yang diciptakan masyarakat saja, tetapi sastra mampu memberikan makna dan sudut pandangan tentang kekuatan sosial bagi pembacanya. Teori hegemoni Gramsci dan sosiologi sastra digunakan untuk meninjau praktik hegemoni kekuasaan di lingkungan lembaga penegak hukum sebagai pemegang kekuasaan. Gramsci membagi dua wilayah kekuasaan sebuah negara yang meliputi masyarakat politi dan masyarakat sipil. Metode penelitian deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini untuk menganalisis dan menguraikan temuan berupa fakta bentuk-bentuk hegemoni kekuasaan pada novel 86 karya Okky Madasari. Tujuan penelitian untuk mengetahui bentuk-bentuk praktik hegemoni kekuasaan pada novel 86 karya Okky Madasari. Tinjauan bentuk-bentuk praktik hegemoni kekuasaan pada penelitian ini terbagi atas dua kelas sosial yaitu, masyarakat politik dan masyarakat sipil. Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan teknik baca, catat dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan dengan identifikasi data, klasifikasi data, analisis data, penarikan simpulan dan pembahasan berdasarkan teori hegemoni Gramsci. Praktik hegemoni kekuasaan yang ditemukan pada penelitian ini sebagai berikut: 1) masyarakat politik yang memanfaatkan kedudukannya untuk menominasi masyarakat sipil melalui bentuk hegemoni kekuasaan berupa sikap penguasa yang berkuasa secara penuh, kekuasaan imbalance dan korup, bersikap kapitalis, sikap solidaritas identitas dan tidak mengancam dan memaksa. 2) masyarakat sipil yang menjadi objek hegemoni merepresentasikan sikapnya dengan cara menentang pemimpin dan penguasa, patuh pada pemimpin atau atasan dan berusaha menyingkirkan penentang.

KATA KUNCI: hegemoni kekuasaan; novel 86; sosiologi sastra

HEGEMONY OF POWER IN NOVEL 86 BY OKKY MADASARI

ABSTRACT: Gramsci's theory of hegemony influences literary studies. Literature is not only seen as a symptom created by society, but literature is able to provide meaning and viewpoints about social power for its readers. Gramsci's theory of hegemony and sociology of literature are used to review the practice of hegemony of power within law enforcement agencies as power holders. Gramsci divides the two areas of power of a state which includes political society and civil society. A qualitative descriptive research method was used in this study to analyze and describe the findings in the form of facts on the forms of hegemony of power in Okky Madasari's novel 86. The purpose of this research is to find out the forms of power hegemony practices in novel 86 by Okky Madasari. An overview of the forms of power hegemony practices in this study are divided into two social classes, namely, political society and civil society. The data collection technique for this research was carried out using reading, note-taking and documentation techniques. Data analysis was carried out by identifying data, classifying data, analyzing data, drawing conclusions and discussing based on Gramsci's hegemonic theory. The practice of hegemony of power found in this study is as follows: 1) political society that takes advantage of its position to nominate civil society through forms of hegemony of power in the form of the attitude of the ruler having full power, rewarding and corrupt power, capitalist attitudes, attitudes of identity solidarity and acts of threat and coercion. 2) civil society which is the object of hegemony represents its attitude by opposing leaders and authorities, obeying leaders or superiors and trying to get rid of opponents.

KEYWORDS: hegemony of power; novel 86; sociology of literature

Diterima:
2023-05-26

Direvisi:
2023-05-26

Distujui:
2023-05-31

Dipublikasi:
2023-10-30

Pustaka : Pangestu, I., Suparmin, S., & Sudiatmi, T. (2023). HEGEMONI KEKUASAAN DALAM NOVEL 86 KARYA OKKY MADASARI. *Fon: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia*, 19(2), 261-279. doi:<https://doi.org/10.25134/fon.v19i2.7861>

PENDAHULUAN

Novel sebagai representasi kehidupan manusia tidak pernah lepas dari peran pengarang dalam mengolah imajinasi hingga tercipta sebuah karya yang mampu dinikmati oleh pembaca. Karya sastra hasil pemikiran manusia bersifat fiktif dan imajinatif dituangkan oleh pengarang menggunakan bahasa sebagai media (Pane, 2022; Sugiarti dkk., 2020). Karya sastra dari sudut pandang setiap pembaca memiliki representasi dan olah makna yang berbeda-beda. Setiap pembaca satu dengan pembaca yang lain memiliki tafsir dan pemaknaan yang berbeda terhadap karya sastra yang sama (Imanda & Rizal, 2022 hlm.). Hal ini menunjukkan betapa kompleks dan majemuknya masalah yang diungkap oleh penulis dalam karya sastra. Setiap penulis memiliki gaya serta cara pengungkapan topik permasalahan yang berbeda-beda (Suparmin dkk., 2022). Pengarang selalu mengangkat permasalahan yang tidak jauh dari masalah yang ia hadapi di lingkungan kehidupannya.

Beberapa masalah yang diungkap pengarang dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan fakta dan kejadian di dunia nyata atau kehidupan sehari-hari. Aspek-aspek yang tercermin dalam karya sastra memiliki kemiripan dengan gejala pada kehidupan nyata menjadi bukti bahwa setiap masalah dan situasi yang sedang dialami oleh pengarang menjadi faktor yang menentukan kandungan representasi makna dalam karya sastra (Harahap dkk., 2019; Karuniawati & Andalas, 2022). Novel mampu memberikan gambaran, ide dan gagasan terkait dengan permasalahan hidup setiap manusia, sehingga novel dapat dijadikan sebagai hiburan oleh setiap penikmat atau pembaca karya sastra. Faktor sosial dan keadaan lingkungan sekitar pengarang menjadi salah satu hal yang

mempengaruhi proses penciptaan hingga hasil akhir karya sastra (Damono, 2020). Oleh karena itu, dengan adanya faktor tersebut menjadikan novel pilihan utama pengarang sebagai jalan atau media untuk mengungkapkan ide dan keresahan yang ditemui pengarang.

Novel dapat dikatakan sebagai sebuah cerminan hidup masyarakat berdasarkan situasi dan keadaan zamannya. Gambaran kehidupan berupa aspek sosial, ekonomi, budaya dan politik termasuk beberapa hal yang sering diungkapkan oleh pengarang ke dalam novel (Damono, 1978). Beberapa permasalahan yang diangkat pengarang dalam karya sastra novel memiliki peran dalam memberikan padangan lain terhadap pembaca mengenai kehidupan sosial. Oleh karena itu, sastra selalu terikat secara utuh dan memiliki relevansi atau hubungan sesuai dengan kondisi zaman yang ada pada saat itu (Sudiatmi dkk., 2022). Sebagai media pengarang untuk mengungkapkan fakta sosial, sastra melahirkan nilai-nilai dan makna. Salah satu fakta sosial tersebut berkaitan tentang gejala-gejala kelas sosial dan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat pada umumnya (Karuniawati & Andalas, 2022).

Pengarang mampu memberikan pengaruh terhadap pola pikir pembaca, salah satunya tentang perubahan dan gejala pada struktur sosial dan kekuasaan secara hierarki pada masyarakat Indonesia lewat karya sastra novel. Kekuasaan merupakan bentuk suatu hak yang dimiliki oleh seseorang baik kelompok maupun individu untuk menjalankan suatu sistem tertentu yang sudah dibuat. Kekuasaan tertinggi pada suatu kelompok masyarakat digolongkan dengan dua cara yaitu sebagai “dominasi” dan sebagai “kepemimpinan moral dan intelektual” (Patria & Arief, 2015). Sistem kekuasaan pada masyarakat terbagi antara pihak yang

berperan sebagai pemerintah dan pihak yang diperintah. Secara hierarki klasifikasi seperti ini akan membentuk kelas-kelas masyarakat yang dominan pada peran dan posisi masing-masing individu di masyarakat (Khasanah, 2019). Kelas sosial yang berkedudukan di pemerintahan akan mendapatkan kekuasaan untuk memimpin jalannya suatu sistem dan melaksanakan kepemimpinan sesuai dengan jabatan fungsionalnya. Sebaliknya, kelompok sosial masyarakat yang diperintah akan menerima perintah atau komando dari pemegang kekuasaan di pemerintahan (Rokhmansyah, 2019; Vidiyanti, 2018). Sistem kekuasaan yang terjadi antara penguasa dan wilayah kekuasaan akan menimbulkan dominasi, baik secara disengaja maupun tidak disengaja.

Pemahaman bahwa sastra merupakan cermin kehidupan masyarakat membuat beberapa orang menganggap jika kajian sosiologi sastra sangat mudah dilakukan oleh siapapun. Hal tersebut karena sastra lahir dari pengarang yang termasuk bagian dari masyarakat yang sama. Pemahaman semacam itu akan menyebabkan kajian sosiologi sastra menjadi kurang esensial dan tidak ada kejelasan. Padahal permasalahan tersebut diakibatkan karena beberapa peneliti maupun pengkaji tidak mengerucutkan fokus permasalahan penelitiannya, sedangkan sosiologi sastra merupakan ilmu yang sangat luas untuk bisa dikaji lebih dalam (Dayanti & Triadnyani, 2019). Oleh karena itu pada penelitian ini fokus utama terletak pada problem sosial yang berupa hegemoni yang dikerucutkan lagi pada praktik kekuasaan.

Hegemoni Gramsci mampu memberikan pengaruh terhadap sudut pandang baru tentang studi kesusastraan. Sastra tidak cukup dipandang hanya sebagai gejala yang ditentukan oleh masyarakat kelas berdasarkan infrastrukturnya, tetapi sastra dapat berdiri

sendiri secara independen dan dapat dipahami sebagai suatu kekuatan sosial, politik maupun budaya (Latifah & Putra, 2020). Konsep awal hegemoni Gramsci bermula pada pemahaman tentang kelas-kelas sosial yang berkuasa selalu menjalankan sistem kekuasaan dengan menerapkan kekerasan dan persetujuan pada masing-masing pihak, baik penguasa maupun masyarakat biasa. Pemahaman dari sudut pandang lain, Gramsci menciptakan konsep baru bahwa hegemoni dapat dibangun dengan dasar moral dan persetujuan antar pihak dengan cara menanamkan ideologi serta gagasan yang dapat diterima tanpa adanya penolakan (Febrianto & Rahma, 2020). Pemikiran tentang hegemoni oleh Gramsci selalu mengutamakan gagasan atau ide dan tidak mengutamakan kemampuan fisik untuk mengatur dan menjalankan suatu sistem.

Penelitian ini akan membahas dan mendeskripsikan tentang hegemoni kekuasaan pada novel 86 karya Okky Madasari. Melalui novel 86 karya Okky Madasari akan dideskripsikan sebuah realitas suatu kelompok kelas sosial dalam mempertahankan dunia kecilnya lewat kekuasaan yang dipegang masing-masing tokoh pada novel. Para tokoh melakukan upaya dengan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya agar tetap berjalan dan tidak hilang. Kehidupan sosial semacam itu banyak terjadi di masyarakat, namun tidak banyak orang mengetahui bahwa hal tersebut mampu menimbulkan dampak negatif terhadap pihak yang menjadi korban kekuasaan khususnya masyarakat kelas bawah. Pihak yang memanfaatkan hal itu berusaha menggunakan kekuasaannya untuk meraih kepentingan pribadi.

Novel 86 karya Okky Madasari dipilih sebagai objek penelitian didasarkan pada isi kandungan di dalamnya yang menggambarkan kehidupan sosial suatu kelompok masyarakat pemegang jabatan

yang bersifat korup dan mendominasi sistem yang sudah dibuat. Novel 86 merepresentasikan sebuah lembaga penegak hukum yang bekerja menuntaskan segala perkara dalam perkerjaannya dengan menggunakan embel-embel uang (Madasari, 2017). Semua tokoh dalam novel 86 menganggap bahwa uang merupakan satu-satunya jalan keluar dalam menyelesaikan semua perkara yang dihadapi. Mulai dari hakim yang berperan sebagai lembaga pengadilan bisa mengadili suatu perkara jika ada uang pelicin yang ia terima. Hal semacam itu juga terjadi hingga struktur yang paling bawah pada novel tersebut. Misalnya, pejabat kelurahan yang mengurus surat-surat administrasi di lembaga tertentu harus diselesaikan dengan membayar seharga uang yang ditentukan oleh kedua pihak. Para tokoh dalam novel tersebut juga memanfaatkan kedudukannya untuk mengatur dan menguasai wilayah kekuasaannya agar sistem yang mereka buat tetap berjalan. Hal itu menunjukkan bahwa suatu kelas sosial di masyarakat berhasil terhegemoni oleh pemegang jabatan yang didasarkan pada moral dan persetujuan antar tokoh pada novel tersebut.

Penelitian tentang hegemoni Gramsci pernah dilakukan oleh Urbaningrum & Putra (2020), pada artikel jurnal penelitiannya yang berjudul "The Power of Money Politic in the Novel Namaku Subardjo By Hapsari Anggarini: Perspective Hegemony Gramsci" (Urbaningrum & Putra, 2020). Pada penelitian tersebut menggunakan teori hegemoni Gramsci untuk meninjau bentuk kekuasaan *Money Politic* pada novel Namaku Subardjo karya Hapsari yang dilakukan oleh masyarakat kelas elit dan menengah. Tinjauan bentuk kekuasaan *money politic* pada penelitian tersebut dibagi menjadi dua kelas sosial antara kelas sosial elit dan menengah, karena praktik *money politic* pada novel tersebut

terjadi secara sukarela dan tanpa kekerasan maupun paksaan. Penelitian tentang hegemoni kekuasaan juga pernah dilakukan oleh Taufiqi, dkk (2021) dalam artikel jurnal penelitiannya berjudul "Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori" (Taufiqi dkk., 2021). Penelitian tersebut menggunakan teori hegemoni Salmini untuk mengetahui bentuk kekuasaan berupa ideologi otoritarianisme dan ideologi demokrasi dengan menggunakan pendekatan elemen kesadaran, material, solidaritas-identitas dan kebebasan. Penelitian lainnya oleh Imanda & Rizal (2022), dalam artikel jurnal penelitiannya berjudul "Social Deviation in the Novel Entitled 86 By Okky Madasari: A Study of the Sociology of Literature" (Imanda & Rizal, 2022). Pada penelitian tersebut membahas masalah-masalah bentuk penyimpangan sosial yang menyebabkan ketidakteraturan di masyarakat pada novel 86 karya Okky Madasari menggunakan teori realitas sosio-historis. Penyimpangan tersebut didasarkan pada empat faktor utama yang mempengaruhi, yaitu faktor ekonomi, sosial budaya, psikologis, dan biologis..

Persamaan penelitian ini dengan penelitian Urbaningrum & Putra adalah penggunaan teori hegemoni Gramsci. Penelitian Oleh Urbaningrum dan Putra menggunakan teori hegemoni Gramsci untuk mengetahui kekuasaan *money politic* yang dilakukan oleh kelas sosial elit dan menengah. Sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori hegemoni kekuasaan Gramsci untuk mengetahui bentuk-bentuk hegemoni kekuasaan dari seluruh aspek yang ditinjau berdasarkan kelas sosial masyarakat politik dan masyarakat sipil. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Taufiqi, dkk (2021) yaitu sama-sama membahas terkait dengan hegemoni kekuasaan. Perbedaannya jika penelitian tersebut menggunakan Novel Laut

Bercerita Karya Leila S. Chudori, sedangkan penelitian ini menggunakan novel 86 karya Okky Madasari. Selain itu, teori yang digunakan oleh penelitian terdahulu tersebut menggunakan teori hegemoni Salmini untuk mengetahui bentuk kekuasaan berupa ideologi otoritarianisme dan ideologi demokrasi, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori hegemoni Antonio Gramsci untuk mengetahui bentuk-bentuk hegemoni kekuasaan. Pada penelitian relevan yang ketiga oleh Imanda & Rizal memiliki persamaan dasar pada objek penelitian yang berupa novel 86 karya Okky Madasari. Fokus utama pada penelitian tersebut pada bentuk ketimpangan sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat yang menyebabkan masalah pada tatanan masyarakat. Sedangkan fokus pada penelitian ini pada bentuk praktik hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh tokoh pada novel 86 yang direpresentasikan melalui dialog dan perilaku tokoh. Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian terhadap novel 86 karya Okky Madasari dengan judul "Hegemoni Kekuasaan dalam Novel 86 Karya Okky Madasari."

METODE

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif dilakukan dengan memaparkan fakta dan gejala yang diuraikan, kemudian disusun menggunakan analisis berdasarkan teori hegemoni kekuasaan Gramsci. Metode deskriptif pada penelitian ini menghasilkan paparan uraian terhadap objek penelitian berupa hegemoni kekuasaan dalam novel 86 karya Okky Madasari. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka dengan menerapkan langkah-langkah pengumpulan data berupa teknik baca, catat dan

dokumentasi. Data pada penelitian ini berupa kutipan-kutipan berbentuk frasa, klausa dan kalimat yang mengandung hegemoni kekuasaan dalam novel 86 karya Okky Madasari.

Pendekatan sosiologi sastra digunakan pada penelitian ini untuk membahas dan mengkaji permasalahan hegemoni kekuasaan. Novel 86 karya Okky Madasari menjadi sumber data primer pada penelitian ini. Proses analisis data penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik deskripsi. Teknik analisis deskripsi dilakukan dengan tahapan sebagai berikut; 1) melakukan identifikasi terhadap data sesuai dengan rumusan masalah, 2) melakukan klasifikasi terhadap data berdasarkan jenis dan kebutuhan pada rumusan masalah, 3) melakukan analisis dan interpretasi terhadap temuan data sesuai dengan klasifikasinya; 4) melakukan penarikan simpulan terhadap hasil analisis data untuk menjawab permasalahan penelitian, 5) pembahasan terhadap data berdasarkan teori hegemoni kekuasaan Gramsci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

BENTUK HEGEMONI KEKUASAAN PADA NOVEL 86 KARYA OKKY MADASARI

Bentuk hegemoni kekuasaan direpresentasikan lewat rangkaian peristiwa, tindakan atau tingkah laku dan percakapan para tokoh antara kelas sosial, baik masyarakat politik maupun masyarakat sipil. Sistem kekuasaan yang dijalankan akan membentuk sebuah pola dominasi, sehingga kelas sosial yang berada di atas dapat dengan mudah mengatur kelas sosial yang berada di bawahnya. Hegemoni kekuasaan diutarakan oleh Gramsci terbagi atas dua wilayah, yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik.

Pelaku hegemoni pada novel 86 didominasi oleh para pemangku kebijakan di sebuah lembaga penegak hukum

dengan para klien dan lembaga bawahannya. Sistem kekuasaan yang sedemikian rupa membuat para penguasa memiliki kesempatan untuk menggunakan kekerasan dan pemufakatan atau kesepakatan untuk memperoleh dan mempertahankan jabatannya.

Masyarakat Politik

1. Pemimpin Berkuasa

Potret pemimpin yang berkuasa pada novel 86 karya Okky Madasari ditunjukkan lewat beberapa tokoh, antara lain adalah para pemegang jabatan di lingkungan pengadilan yang bekerja secara sepihak dalam memutus perkara. Potret para pemimpin yang berkuasa digambarkan dalam novel 86 karya Okky Madasari didominasi oleh para pemangku kebijakan yang berwenang menangani berbagai permasalahan hukum. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh para tokoh tidak pandang bulu terhadap pihak yang ia dominasi. Penguasa memanfaatkan kedudukan melalui tindakan, strategi, cara dan rencana-rencana untuk memenuhi apa yang ia inginkan. Pelaku hegemoni meletakkan kesadaran peran dan posisi masing-masing untuk menjalankan sistem kekuasaannya (Geleuk, 2020). Pemimpin yang memiliki kedudukan lebih tinggi memanfaatkan jabatannya untuk mengatur dan menguasai kelas sosial di bawahnya. Potret pemimpin berkuasa pada novel 86 karya Okky Madasari digambarkan oleh beberapa tokoh sebagai berikut.

“Mau Bapak-bapak ini apa? Masa semauanya geledah rumah orang, “kata Bu Danti dengan nada tinggi. Ia sedang marah.

“Ini kami bawa surat penggeledahan, Bu,” terdengar suara seorang laki-laki.

Bu Danti terus melawan. “Iya, tapi alasannya apa rumah saya digeledah? Jangan sembarangan ya, begini-begini saya juga tahu hukum.”

“Keberatannya disampaikan nanti saja, Bu. Yang penting sekarang kami mau geledah dulu.” (Madasari, 2017, hlm. 143).

Bu Danti yang berprofesi sebagai seorang pengacara telah dicurigai oleh lembaga KPK terkait kasus suap dan korupsi yang dilakukannya. Sebagai lembaga penegak hukum, KPK menjalankan tugas berdasarkan kasus yang ditangani. Pada kasus yang ditangani terhadap Bu Danti, KPK menunjukkan kekuasaan penuhnya dalam menjalankan tugas untuk menggeledah paksa rumah Bu Danti. KPK menggeledah rumah Bu Danti meskipun mendapatkan penolakan dari Bu Danti. Penggeledahan tersebut tetap dilakukan karena KPK menjalankan tugas yang berbekal surat penggeledahan. KPK memanfaatkan identitasnya untuk berkuasa penuh menggeledah rumah Bu Danti. Sebagai taerget sasaran, perlawanan yang dilakukan Bu Danti tidak berpengaruh apapun atas tindakan yang dilakukan KPK. Tindakan yang dilakukan lembaga negara yang tidak dapat dicegah menunjukkan bahwa adanya kepemimpinan yang berkuasa secara penuh.

2. Kekuasaan Imbalan dan Korup

Imbalan atau upah menjadi hal yang dianggap berharga oleh beberapa tokoh dalam novel 86 karya Okky Madasari. Upah maupun imbalan menjadi syarat utama untuk menyelesaikan segala perkara yang sedang ditangani. Imbalan dalam

bentuk uang menjadi alat utama dalam menggerakkan sistem kekuasaan para penguasa. Melalui sarana tersebut para penguasa membuat sistem kesepakatan terhadap pihak yang ia kuasai untuk menyelesaikan suatu perkara dengan syarat memberikan imbalan atau upah. Para tokoh merasa tanpa ada imbalan ia tidak dapat menjalankan pekerjaannya, sehingga segala pekerjaan baru bisa ia diselesaikan jika ada uang atau imbalan. Para pelaku yang bertindak secara korup dominan dilakukan oleh para atasan yang bekerja sebagai pengacara, jaksa, hakim, bahkan kepala desa. Mereka menciptakan sistem tersendiri untuk menutupi kinerja mereka agar terlihat profesionalitasnya. Gambaran kekuasaan imbalan dan korup pada novel 86 karya Okky Madasari direpresentasikan sebagai berikut.

“Ini ada titipan dari Bu Danti,” kata laki-laki itu sambil menunjuk kardus besar yang tergeletak di tanah, di dekat kaki dua laki-laki berseragam pelayan supermarke.

“Titipan...?”

“Yah, semacam hadiahlah. Semacam ucapan terima kasih...”

“Hah?” Arimbi kebingungan.

“Ucapan terima kasih Bu Susannah karena sudah dibantu urusannya. Semuanya sudah terima bagiannya. Tinggal Ibu saja.” (Madasari, 2017, hlm. 42).

Arimbi sebagai seorang juru ketik dibawah kepemimpinan Bu Danti awalnya belum pernah tahu sistem kerja dijalankan oleh Bu Danti. Bu Danti selalu memberikan imbalan untuk pekerjaannya jika ia mau mengerjakan apa yang telah diperintahnya. Pada kasus ini Arimbi

berhasil terhegemoni oleh Bu Danti dengan diberikannya sebuah imbalan berupa sebuah barang yang diantar petugas toko ke alamat rumahnya. Dominasi penguasa terhadap bawahan dapat dilakukan dengan cara memberi penghargaan atau sesuatu yang dianggap berharga oleh penerimanya (Kasmuri, 2017). Imbalan merupakan sesuatu yang dianggap berharga oleh seseorang yang diperoleh dari orang lain karena telah melaksanakan perintah atau pekerjaan. Meskipun hanya sebagai tanda ucapan terima kasih dari Bu Danti, hadiah tersebut memiliki maksud lain agar Arimbi selalu patuh terhadap segala perintah yang diberikan oleh Bu Danti.

Arimbi mengangguk. Dia masih mengingatnya. Widodo teman SD mereka juga. Sekolah STM, sama seperti Narno. Bapaknya punya sawah sendiri, seperti bapak Arimbi. Selepas STM tak mau cari kerja, hanya keluyuran di kampung dengan motor yang dibeli dari panenan bapaknya.

“Jadi pamong dia sekarang. Bayar 40 juta,” jelas Narno.

“Hah...?” Arimbi tak percaya. “Jadi pamong bayar 40 juta?”

Narno mengangguk.

“Bayar ke siapa?”

“Ya ke desa. Buat kas.”

“Aturan siapa?” Arimbi masih tak percaya.

“Ya aturan desa.”

“Pokoknya siapa yang bisa bayar diangkat jadi pamong?”

Arimbi masih tak percaya.

“He-eh... tapi kan tidak semua orang bisa bayar,” jawab Narno. Suaranya terdengar kelu (Madasari, 2017, hlm. 60).

Praktik korupsi tidak hanya berjalan di lembaga negara yang berkedudukan di atas saja. Pada novel 86 karya Okky Madasari praktik korupsi juga digambarkan di kalangan pemerintahan yang berkedudukan di bawah. Pada kutipan di atas terjadi praktik hegemoni yang dilakukan oleh pemerintah terhadap masyarakatnya. Pemerintah desa melakukan praktik suap dan korupsi kepada para calon perangkat desa. Pemerintah desa mamtok harga sejumlah uang kepada warganya yang ingin bekerja menjadi pamong atau perangkat desa. Masyarakat bisa menjadi perangkat desa jika ia mampu memenuhi syarat dengan membayarkan uang yang telah ditentukan oleh pemerintah desa. Pada kutipan di atas, tokoh bernama Widodo teman Arimbi semasa kecil harus membayar uang sejumlah 40 juta sebelum ia menjadi pamong di pemerintah desanya. Lingkungan pemerintah desa arimbi membuat kebijakan sendiri bagi siapapun yang memiliki kepentingan atau urusan dengan instansi desa. Segala urusan dapat diselesaikan jika ia mampu membayar dengan jumlah uang yang sudah ditetapkan oleh pihak desa, salah satunya adalah Widodo. Kasus suap maupun korupsi di desa Arimbi bahkan sudah tidak menjadi rahasia umum bagi masyarakat setempat. Kasus yang digambarkan pada kutipan tersebut menunjukkan adanya hegemoni kekuasaan berupa tindakan yang bersifat korup. Permasalahan utama pada kutipan di atas terletak pada kekuasaan pemerintah desa yang mampu mendominasi warganya dengan cara membuat sistem yang bersifat korup.

Ada juga Samuel Hutabarat, pengacara yang kasus terbaru-nya masih belum mulai sidang, meminta agar jadwal sidang bisa dibuat Rabu siang. Untuk permintaan ini, Arimbi bingung setengah mati. Setiap jadwal sidang selalu tergantung waktu hakim. Dia hanya mengiyakan, tapi tak yakin bagaimana caranya. Dan mungkin inilah yang namanya keberuntungan, ternyata jadwal yang dibuat hakim itu juga Rabu siang. Samuel girang, ia yakin semuanya telah diatur Arimbi. Dia berterima kasih dengan memberikan amplop berisi sepuluh lembar seratus ribu dan berseru, "Beres! Delapan enam ya!" (Madasari, 2017, hlm. 107).

Arimbi sebagai seorang juru ketik harus mengatur jadwal sidang sesuai berdasarkan urutan dan antrean. Sedangkan Samuel Hutabarat meminta suapaya sidang kasusnya dilaksanakan pada hari Rabu siang mendatang. Hal tersebut membuat Arimbi sedikit kebingungan karena semua jadwal sidang ditentukan oleh hakim. Sebagai seorang bawahan Arimbi harus nurut pada perintah atasan. Meskipun demikian ternyata jadwal yang dibuat oleh hakim sesuai dengan permintaan Samuel Hutabarat. Samuel beranggapan bahwa jadwal tersebut telah diatur oleh Arimbi, maka ia memberikan imbalan kepada Arimbi berupa sejumlah uang sambil mengatakan "Beres! Delapan enam ya!". Arimbi dan Samuel sudah sama-sama memahami maksud istilah 86 yang diucapkannya. Istilah 86 merupakan suatu istilah yang merujuk pada maksud antara kedua belah pihak agar melancarkan segala urusan karena telah diberikan imbalan timbal balik antara keduanya. Maksud dari

istilah 86 tidak hanya diketahui oleh Arimbi dan Samuel saja, tetapi maskud tersebut telah diketahui oleh semua orang yang bekerja bersama mereka. Istilah 86 selalu digunakan oleh orang-orang di lingkungan kerja Arimbi sebagai bahasa untuk menyampaikan maskudnya kepada orang lain.

3. Bersikap Kapitalis

Sikap kapitalisme merujuk pada sebuah pemahaman tentang kebebasan dan kekayaan materi yang diperoleh setiap individu dalam memanfaatkan suatu momen tertentu. Kepemilikan harta atau kekayaan menjadi elemen kesadaran yang dimiliki setiap manusia untuk menggerakkan semua lini kehidupan, salah satunya adalah kekuasaan. Sikap kapitalis dalam novel 86 karya Okky Madasari hampir dimiliki oleh seluruh tokoh. Oleh karena itu, setiap individu tokoh selalu memanfaatkan kebebasannya untuk memperoleh keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya.

Arimbi menghitung, kalau dalam seminggu ada dua putusan yang diketiknya, dia akan mendapat 400.000. Sebulan dia akan dapat uang tambahan lebih dari satu setengah juta. Itu masih belum termasuk bonus yang akan diberikan Bu Danti. Mulai sekarang dia juga harus merayu Bu Danti, meminta bonus dari setiap putusan yang diketiknya. Toh uang 200.000 tidak akan berarti apa-apa bagi mereka, pikir Arimbi (Madasari, 2017:103).

Segala bentuk cara dilakukan untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebanyak-banyaknya. Arimbi selalu memanfaatkan kesempatan

untuk mendapatkan keuntungan berupa apapun, salah satunya uang dari Bu Danti. Arimbi selalu berharap jika ia telah selesai melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bu Danti ia akan memperoleh keuntungan tambahan. Pada kutipan di atas, Arimbi beranggapan jika ia dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu sebulan, maka ia akan mendapatkan tambahan uang kurang lebih satu setengah juta dan itu belum termasuk bonusnya. Setiap putusan yang selesai diketik, Arimbi akan berusaha merayu Bu Danti untuk meminta tambahan berupa uang. Arimbi menganggap jika uang sebanyak itu tidak terlalu berarti bagi seorang Bu Danti yang bekerja sebagai seorang pengacara. Pemikiran yang dimiliki oleh Arimbi tersebut merujuk langsung pada tindakan yang bersifat kapitalisme. Pemikiran yang bersifat kapitalisme yang dapat terealisasikan semacam itu akan menimbulkan kepuasan pribadi apabila keinginan seseorang dapat terpenuhi terhadap dirinya (Wahyuni, 2019). Kesadaran akan kebebasan dan ideologi kapitalis yang disertai dengan kedudukan atau jabatan akan dimanfaatkan oleh seseorang untuk menjalankan kekuasaannya dan mendominasi suatu kelas sosial.

“Bapakku dulu ceperannya lumayan, Mbi. Dapat persenan dari mana-mana. Bantuin orang yang mau urus sertiikat.” (Madasari, 2017, hlm. 97).

Konsep kapitalisme selalu merujuk pada keuntungan pribadi yang diperoleh dengan jalan memanfaatkan situasi dan kondisi. Kepemilikan harta yang melimpah dapat menjadi target utama dalam memenuhi kepuasan pribadi

seseorang melalui jabatan yang dimilikinya. Pada kutipan di atas dikatakan oleh Ananta jika bapaknya dahulu sering memperoleh *ceperan*. *Ceperan* yang dimaksudkan yaitu penghasilan tambahan yang diperoleh di luar gaji pokok karena pekerjaan sampingan atau pekerjaan tambahan. Bapaknya Ananta yang bekerja sebagai juru bantu di instansi perpajakan, selalu memanfaatkan siapapun yang memiliki kepentingan mengurus sertifikat untuk mendapatkan penghasilan tambahan tersebut. Ia akan memperoleh bonus tambahan dari orang-orang atas pekerjaan mengurus sertifikat yang telah ia kerjakan. Hal tersebut dilakukan, karena ia sangat mengenal para pegawai instansi, sehingga segala urusan dapat dipermudah.

4. Solidaritas Identitas

Solidaritas identitas selalu berkaitan dengan instansi negara yang berperan menjadi alat kekuasaan negara sebagai tangan panjangnya. Kelas sosial satu dengan kelas sosial yang lain dapat terikat dengan adanya sikap solidaritas identitas. Menurut Gramsci dalam Patria & Arief, (2015), persamaan ideologi antara dua kelas sosial yang berbeda menjadi faktor utama terjadinya hubungan antara dua kelas sosial tersebut. Selain persamaan ideologi, kepentingan antar kelas sosial juga dapat mempererat hubungan antar kelas sosial. Solidaritas identitas pada novel 86 karya Okky Madasari terjadi antar tokoh yang memiliki sudut pandang ideologi dan kepentingan yang sama.

*Pak Lurah melanjutkan,
"Anak saya yang nomor dua itu baru lulus kuliah. Sarjana hukum juga. Lha kok katanya pengin*

kayak Mbak Arimbi, kerja di kantor pengadilan."

"Oh... biasanya nanti bulan Juni ada bukaan. Nanti suruh daftar saja, ikut ujiannya."

"Ya, kalau itu sudah jelas. Yang belum jelas itu kan keterima apa tidaknya."

Arimbi bingung. Ia tidak mengerti apa yang sedang dibicarakan Pak Lurah. Ruang tamu senyap beberapa saat.

"Maksud saya, Mbak, mau minta tolong Mbak Arimbi untuk dicarikan jalan." (Madasari, 2017, hlm. 62).

Hubungan yang terjalin secara baik antar tokoh mendorong terjadinya proses hegemoni. Perbedaan kelas sosial yang tidak menghambat terjadinya proses hegemoni berupa solidaritas identitas. Sebagai seorang tokoh masyarakat yang memiliki kedudukan sebagai kepala desa, Pak Lurah berupaya meminta kepada Arimbi memberikan pekerjaan anaknya. Identitas Arimbi sebagai pekerja juru ketik di kantor pengadilan menjadikan dirinya merasa terpandang dan dianggap oleh Pak Lurah bisa memberikan anaknya pekerjaan seperti Arimbi. Proses hegemoni ini terbangun karena adanya kepentingan Pak Lurah untuk meminta tolong kepada Arimbi agar dicarikan kerja untuk anaknya yang baru lulus kuliah. Arimbi memberikan penolakan secara halus kepada Pak Lurah karena merasa kebingungan dan menyadari jika dirinya hanya seorang pegawai rendahan juru ketik. Penolakan dilontarkan Arimbi karena ia merasa jika dahulu ia diterima kerja bukan karena kepintarannya, melainkan karena nasibnya yang beruntung. Secara hierarki kedudukan Pak Lurah

sebagai kepala desa lebih tinggi dari Arimbi yang hanya bekerja sebagai juru ketik. Persamaan identitas antara keduanya hanya terlihat pada asal daerah mereka yang sama-sama berasal dari kalangan masyarakat desa. Hal tersebut yang melatarbelakangi Arimbi menerima Pak Lurah untuk menyampaikan keperluannya kepada dirinya.

Ia membuka koper itu. Menyentuh tumpukan uang di depannya. "Sudah dihitung tadi? Dua, kan?"

"Sudah, Bu. Pas dua."

"Bagus. Kamu nggak cerita ke siapa-siapa, kan?"

Arimbi menggeleng. "Nggak, Bu."

"Bagus, jaga rahasia. Jangan sampai bocor. Ini aku nyuruh kamu karena percaya kamu orangnya bisa jaga rahasia."

"Iya, Bu."

"Aku sudah harus lebih hati-hati sekarang, Mbi. Sudah banyak orang kenal aku. Nanti kalau ada yang lihat aku ketemu pengacara terus disebar-sebarin, bisa jadi masalah. Sekarang kan lagi musim orang cari muka. Lapor sana, lapor sini, sok bersih. Padahal duitnya juga hasil rampokan semua." (Madasari, 2017, hlm. 142).

Hubungan antara atasan dan bawahan di bidang pekerjaan membuat dua pihak berbeda memiliki rasa sepenanggungan yang sama. Rasa sepenanggungan akan mendorong terjadinya sikap solidaritas identitas. Pada kutipan di atas, keadaan Bu Danti yang semakin terancam membuat dirinya meminta kepada Arimbi untuk menjaga rahasia

tentang tindakan yang dilakukan Bu Danti. Persamaan ideologi dan identitas sebagai pegawai di kantor pengadilan yang sama-sama tahu melakukan tindak korupsi membuat keduanya merasa saling menjaga rahasia. Meskipun memiliki ideologi yang sama, keduanya tetap memiliki perbedaan sudut pandang dan kedudukan yang berbeda. Arimbi yang merasa menjadi bawahan Bu Danti menerima permintaannya agar menjaga rahasia demi keduanya tetap terjaga. Proses hegemoni akan berlangsung dengan mudah tanpa harus menghilangkan ideologi pribadi masing-masing, apabila kedua belah pihak memiliki tendensi dan kepentingan yang sama. Hal tersebut terjadi secara alamiah, supaya kekuasaan maupun sistem yang mereka buat tetap berjalan sesuai keinginan.

Arimbi tahu, Adrian mau jadi pengacara tanpa dibayar pasti bukan tanpa tujuan. Setiap perkara korupsi KPK sedang digandrungi banyak orang. Dia mau terkenal. Ingin namanya setiap hari muncul di koran. Lalu nantinya orang-orang ramai memakai jasanya, dan dia bisa pasang harga tinggi, pengacara yang sudah punya pengalaman mengurus kasus korupsi. Tapi Arimbi tak peduli. Ia sedang butuh pengacara dan tak punya uang untuk membayar. Mereka lagi-lagi sama-sama dapat untung. Semua beres dan bisa dimengerti. Delapan enam, meski tanpa ada yang keluar uang (Madasari, 2017, hlm. 155).

Beberapa orang yang sama-sama saling memiliki kepentingan mampu mendorong terjadinya

hegemoni kekuasaan berupa solidaritas identitas. Dua kelas sosial yang berbeda ideologi dapat bersatu karena saling bergantung pada pihak lain demi tercapainya suatu kepentingan tertentu (Yunitasari dkk., 2022). Arimbi yang sedang mengalami masalah sangat membutuhkan bantuan untuk menyelesaikan perkara hukum yang sedang ia hadapi. Adrian sebagai seorang pengacara menawarkan diri untuk membantu Arimbi sebagai pengacaranya tanpa harus dibayar. Meskipun demikian, Arimbi beranggapan bahwa Adrian membantu dirinya pasti memiliki kepentingan lain agar namanya semakin terkenal dan banyak yang menggunakan jasa Adrian dalam kasus yang lain. Arimbi dan Adrian memiliki tujuannya masing-masing yang saling menguntungkan, apabila Arimbi mau menerima tawaran Adrian. Hubungan Arimbi dan Adrian hanya sekadar teman kerja atasan dan bawahan, tetapi hubungan keduanya tidak menjadi penghambat penyatuan dua kelas sosial yang berbeda tersebut. Tawaran Adrian berhasil diterima Arimbi, hal tersebut menunjukkan adanya keberhasilan proses hegemoni kekuasaan berupa solidaritas identitas antara keduanya.

5. Tindak Mengancam dan Memaksa

Tindakan mengancam merupakan suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan bahaya dan suasana tidak nyaman terhadap pihak lain. Salah satu ciri masyarakat politik adalah adanya tindakan ancaman atau paksaan terhadap masyarakat sipil. Ancaman yang diberikan terhadap orang lain dapat berupa ancaman verbal dan non verbal. Seseorang yang memberikan ancaman bisa saja

hanya berupa gertakan bahkan bisa berpotensi pada tindakan yang mengancam fisik. Ancaman dan paksaan memiliki hubungan antar keduanya, hal tersebut berdasarkan kepentingan atau keinginan dari pihak yang memberikan ancaman (Asri & Irma, 2022). Secara tidak langsung orang yang memberikan ancaman akan membuat pihak yang diancam merasa mendapat tekanan atau paksaan. Pada novel 86 karya Okky Madasari tindakan ancaman dan paksaan dilakukan antar tokoh demi memenuhi keinginan masing-masing tokoh tersebut.

Empat petugas masuk ke tengah-tengah ruangan. Dua di antaranya segera memegang tangan perempuan itu. Dua yang lainnya berdiri di belakangnya sambil menggiring mereka ke luar. Perempuan itu meronta, mempertahankan diri untuk tetap berada di ruangan itu. Dia berteriak, "Tanah itu punya saya, Pak Hakim! Punya orangtua saya! Mereka mau mengambilnya!". Perempuan itu menangis sambil terus berteriak-teriak. Badannya tak lagi tegak, kepalanya sejajar dengan pinggul dua laki-laki yang membawanya. Kedua kakinya menggebrak-gebrak lantai (Madasari, 2017, hlm. 35).

Tindak mengancam dan memaksa dapat dilakukan melalui aparat negara atau pihak keamanan sebagai tangan panjang negara atau penguasa. Pada kutipan di atas terdapat intervensi yang dilakukan oleh petugas keamanan terhadap seorang perempuan yang berusaha menyuarakan pendapatnya terhadap hakim. Sikap perempuan yang semakin memberontak membuat

petugas memaksa perempuan tersebut keluar dengan cara menggiringnya keluar sambil memegang kedua tangannya. Sebagai warga negara yang demokratis, perempuan tersebut berhak menyuarakan pendapatnya di dalam ruang sidang yang sedang berlangsung. Namun cara yang dilakukan perempuan tersebut dianggap mengganggu proses sidang berlangsung dan membuat petugas memintanya keluar ruang sidang secara paksa. Selain petugas keamanan, hakim yang memimpin sidang pada saat itu juga berhak mengelurakan perempuan tersebut secara paksa melalui tangan petugas keamanan. Adanya tindakan intervensi yang bersifat memaksa menandakan bahwa suatu kelas sosial berhasil terhegemoni.

“Kalian tahu aturannya kalau naik nggak pakai karcis?” tanya petugas itu lagi. Suami-istri itu mengangguk.

“Harusnya kalian aku turunin di sini. Langsung loncat,” petugas itu menahan kalimatnya. “Tapi karena ada bayi itu, aku masih baik, kalian nanti turun begitu kereta berhenti.”

Petugas itu melangkah pergi sambil berkata, “Biar kapok. Wong kere kok mau naik kereta bisnis.” (Madasari, 2017, hlm. 124).

Tindakan ancaman dapat berupa gertakan tanpa harus terjadi kontak fisik secara langsung dengan pihak sasaran. Jenis tindakan ancaman yang terjadi berdasarkan kutipan di atas merupakan ancaman gertakan yang bersifat non militer. Ancaman pada kutipan di atas dilakukan oleh petugas kereta api terhadap penumpang sepasang suami istri. Ancaman secara

verbal dilontarkan petugas kepada sepasang suami istri karena ia ikut naik kereta tanpa memiliki karcis. Petugas kereta api memberikan ancaman karena penumpang tidak mematuhi peraturan. Petugas mengancam kepada sepasang suami istri tersebut dengan memintanya turun dengan cara loncat secara langsung dari dalam gerbong kereta. Ancaman tersebut belum sempat terwujud menjadi kenyataan setelah petugas melihat ada bayi kecil yang dibawa oleh sepasang suami istri tersebut. Rasa simpati dan empati membuat petugas kereta mengurungkan untuk terus melakukan ancaman kepada suami istri tersebut.

Masyarakat Sipil

1. Menentang Pemimpin atau Penguasa

Berbagai upaya ancaman yang dilontarkan secara verbal oleh para pemimpin dan penguasa membuat para pihak yang berkedudukan di bawahnya melakukan upaya untuk melawan intervensi yang diharapkan dapat memberikan pembelaan terhadap pihaknya. Tindakan maupun sikap yang dapat membuat seseorang merasa dirugikan atau merasa terancam akan menimbulkan naluri bagi seseorang untuk menentang dan membela diri sendiri (Rahmaniar dkk., 2021). Tindakan menentang tidak hanya disebabkan karena adanya ancaman, tetapi juga diakibatkan adanya pro kontra antara dua pihak.

Di depan sana, ada kerumunan orang membawa spanduk dan poster dengan bermacam-macam tulisan. Ada juga gambar raksasa orang berseragam jaksa. Salah satu

matanya ditutup dengan spidol warna hitam. Jaksa dalam gambar itu menjadi bajak laut. Di bawah gambar, tulisan “Jaksa Agung” dicoret, diganti dengan “Bajak Agung” (Madasari, 2017, hlm. 24).

Berbagai usaha dilakukan masyarakat sebagai simbol perlawanan terhadap para penguasa dapat direpresentasikan melalui berbagai cara. Pro dan kontra antara penguasa dan masyarakat sipil menjadi salah satu latar belakang munculnya pertentangan masyarakat terhadap penguasa. Pada kutipan di atas digambarkan beberapa kelompok masyarakat melakukan protes yang menentang Jaksa Agung. Masyarakat melakukan tindakan menentang secara tidak langsung tanpa ada kontak fisik dengan penguasa. Sebagai negara yang demokratis masyarakat berhak menyuarakan pendapatnya di muka umum dengan caranya masing-masing. Para Jaksa Agung mendapat protes dari masyarakat melalui cara demonstrasi. Cara kerja para Jaksa Agung menurut masyarakat sangat berpotensi merugikan masyarakat sipil. Masyarakat menganggap Jaksa Agung dan berkedudukan sebagai birokrat di pengadilan tidak bekerja secara adil, sehingga mereka melakukan perlawanan dengan cara berdemonstrasi turun ke jalan.

Ada yang berdiri dan berteriak Jaksa telah salah menuntut orang. Ada yang menangis dan dalam ratapannya berkata, “Sabar, Kak Danti, sabar... Tuhan tahu mana yang salah, mana yang benar.” Seorang laki-laki berdiri di atas tempat duduk dan berteriak, “Pak Hakim, putuskan yang adil. Jangan

dengar jaksa-jaksa itu.” (Madasari, 2017, hlm. 170).

Perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap para pemimpin selalu dilatar belakangi oleh beberapa hal yang dianggap merugikan dan mengancam nasib masyarakat. Pada kutipan di atas, beberapa orang yang berada di ruang sidang melakukan perlawanan terhadap para hakim yang bekerja tidak adil dalam membuat keputusan sidang. Beberapa orang laki-laki melakukan protes dengan cara berteriak kepada hakim agar tidak terpengaruh oleh jaksa-jaksa pada saat itu. Ideologi yang dimiliki oleh para penguasa bertolak belakang dengan ideologi yang dibawa oleh masyarakat umum. Penentang menganggap keputusan yang diambil tidak memihak kepada kebenaran, sehingga beberapa orang yang berada di dalam ruang sidang tidak terima dengan keputusan hakim. Kebebasan yang dimiliki oleh setiap orang berhak diungkapkan selama tidak merugikan orang lain. Pada novel 86 karya Okky Madasari hal itu telah dipraktikkan oleh beberapa orang lelaki yang berada di ruang sidang tersebut.

2. Patuh pada Pemimpin atau Atasan

Salah satu ciri utama masyarakat yang berhasil terhegemoni adalah munculnya sikap pasrah dan tunduk terhadap pemimpin atau penguasa. Salah satu bentuk kepatuhan terhadap pemimpin digambarkan dengan sikap penerimaan dan taat terhadap perintah atasan kepada bawahan.

Arimbi masuk rumah, meraih handphone yang tergeletak di tempat tidur. Dia mengirim SMS

pada Bu Danti. Jangan sampai dia melakukan sesuatu tanpa perintah Bu Danti. Dia masih pegawai rendahan yang harus patuh apa kata atasan, pikirnya (Madasari, 2017, hlm. 43).

Kedudukan dan jabatan dimanfaatkan oleh para pemimpin untuk mengatur bawahannya dengan mudah. Rasa penerimaan timbul dari kelas bawahan daripada atasan karena merasa jika kedudukannya berada di bawah pemimpin mereka. Arimbi sebagai bawahan Bu Danti berhasil terhegemoni agar selalu patuh terhadap segala perintah yang diberikan oleh Bu Danti. Arimbi merasa jika dirinya hanya seorang pegawai rendahan yang harus patuh terhadap segala perintah atasan. Dominasi berhasil diraih oleh Bu Danti atas Arimbi yang bekerja sebagai juru ketik yang berada di bawahnya.

Jam kerja mulai longgar minggu ini. Sidang untuk sementara berhenti. Bu Danti belum menandai satu pun berkas baru yang harus segera disalin. Arimbi bekerja semaunya, mengetik hanya untuk mengisi waktu. Pelan-pelan sesuai yang dia mau. Nanti, seperti biasanya, kalau Bu Danti sudah menagih satu berkas, Arimbi baru akan ngebut, menyalinnya mati-matian, agar bisa cepat-cepat menyelesaikan (Madasari, 2017, hlm. 45).

Dominasi yang ditunjukkan oleh para pemimpin terhadap bawahannya membuat kelas yang berada dibawahnya tunduk terhadap segala perintahnya. Arimbi selalu patuh dan tunduk terhadap segala

perintah yang diberikan oleh Bu Danti. Meskipun sedang tidak ada perintah pekerjaan dari Bu Danti yang harus segera diselesaikan, Arimbi selalu bekerja mengetik sesuai yang dia mau. Keberadaan Arimbi sebagai pegawai juru ketik telah didominasi oleh perintah Bu Danti dengan memanfaatkan kedudukan dan jabatannya. Kesetiaan dan kepatuhan Arimbi terhadap Bu Danti semakin terlihat apabila ia diminta Bu Danti segera menyelesaikan pekerjaan mengetik. Arimbi akan menyelesaikan pekerjaan tersebut dengan keras agar segera terselesaikan.

3. Usaha Menyingkirkan Penentang

Proses hegemoni tidak selalu berjalan dengan lancar tanpa ada halangan dan rintangan, tetapi harus melewati usaha yang cukup keras. Hegemoni yang dilakukan oleh atas terhadap kelas bawah selalu menimbulkan kontradiksi. Kontradiksi yang timbul adanya upaya hegemoni tersebut mengakibatkan pertentangan antara dua belah pihak, sehingga masing-masing pihak selalu berupaya mencari cara untuk menyingkirkan pihak lawan. Pihak terhegemoni yang merasa dirinya terjebak permainan yang dijalankan lawan akan berusaha mencari cara agar dirinya bisa bebas. Kesadaran yang dimiliki oleh pihak yang terhegemoni membuat dirinya berusaha lepas dari hegemoni orang lain. Kesadaran tersebut muncul pada Arimbi yang mengalami konflik dengan Bu Danti sebagai atasannya.

Adrian yang selalu mendampingi diperiksa di KPK. Mengajarinya bagaimana mesti menjawab saat ditanya wartawan. Ia juga membuat kisah untuk Arimbi,

“Pokoknya setiap ditanya bilang kamu nggak tahu apa-apa. Hanya diperintah atasan ketemu orang buat mengambil barang, tak tahu barang itu apa. Duit 50 juta yang di tas itu duit pinjaman dari Bu Danti. Bapakmu sakit di kampung dan butuh uang untuk operasi,” kata Adrian berulang kali (Madasari, 2017, hlm. 155).

Upaya hegemoni yang dilakukan terhadap orang lain tidak selalu berjalan mudah sesuai dengan keinginan. Arimbi sebagai pihak terhegemoni menyadari jika dirinya telah didominasi oleh Bu Danti. Pada kasus konflik antara Arimbi dan Bu Danti, Arimbi merasa dirinya dipermainkan oleh skenario yang sudah dibuat Bu Danti. Arimbi merasa dirinya hanya dijadikan umpan oleh Bu Danti pada transaksi korupsi yang menyeret keduanya. Kesadaran tersebut membuat Arimbi dan Adrian mencari sebuah cara untuk menyingkirkan Bu Danti pada proses persidangan. Adrian sebagai pengacara Arimbi memberikan masukan supaya Arimbi beralasan tidak mengetahui apapun terkait dengan uang yang diberikan Bu Danti kepadanya. Kesadaran akan dirinya membawa seseorang melakukan usaha apapun untuk memperoleh kemenangan atas lawannya. Kebebasan dirinya atas dominasi dari atasan yang sekaligus lawan hukumnya melatarbelakangi usaha Arimbi untuk menyingkirkan dan mengalahkan Bu Danti.

Dada Arimbi sesak. Laki-laki tadi ternyata dukun yang disewa Bu Danti. Dia menggunakan segala cara agar bisa keluar penjara. Dengan uangnya, dia bisa membayar pengacara mahal.

Dengan uangnya juga dia bisa tidur enak di penjara, tak ada bedanya dengan tidur di kamarnya sendiri atau di hotel-hotel berbintang. Bisa jadi juga ia gunakan uangnya untuk membayar jaksa, juga hakim. Dan sekarang dia menyewa dukun (Madasari, 2017, hlm. 161).

Jabatan dan kedudukan yang dimiliki oleh penguasa dapat membuat dirinya melakukan segala hal yang ia inginkan, termasuk menyingkirkan para penentangannya. Menurut Yunita & Putra, (2020), seseorang yang memiliki jabatan dan kedudukan akan memanfaatkan segala hal yang ia punya, termasuk hartanya untuk mengontrol orang lain dan menyingkirkan para penentangannya. Bu Danti yang sedang mengalami konflik dengan Arimbi juga menyadari bahwa ia sedang mendapat perlawanan dari Arimbi pada penyelesaian sidang kasus korupsi yang sedang dijalaninya. Kesadaran atas pertentangan yang dilakukan Arimbi dirasakan Bu Danti menimbulkan pembelaan atas dirinya. Melalui segala sesuatu yang dimilikinya, Bu Danti menyewa seorang dukun untuk mengganggu proses sidang berlangsung. Bu Danti juga memanfaatkan hartanya untuk membayar pengacara, jaksa, hakim dan pihak lapas agar mendapat ruang penjara yang enak.

KESIMPULAN

Berdasarkan tinjauan ditemukan bentuk praktik hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh dua kelas sosial antara masyarakat politik dan masyarakat sipil. Bentuk praktik hegemoni kekuasaan yang ditemukan pada novel 86 karya Okky Madasari sebagai berikut: 1) masyarakat

politik yang memanfaatkan kedudukannya untuk mendominasi masyarakat sipil melalui bentuk hegemoni kekuasaan berupa sikap penguasa yang berkuasa secara penuh, kekuasaan imbalan dan korup, bersikap kapitalis, sikap solidaritas identitas dan tindak mengancam dan memaksa. 2) masyarakat sipil yang menjadi objek hegemoni merepresentasikan sikapnya dengan cara menentang pemimpin dan penguasa, patuh pada pemimpin atau atasan dan berusaha menyingkirkan penentang.

Hegemoni kekuasaan dilakukan oleh kelas masyarakat politik terhadap masyarakat sipil. Tindakan hegemoni kekuasaan yang dilakukan oleh kelas penguasa menimbulkan sikap masyarakat sipil sebagai objek dominasi berupa pertentangan dan kepatuhan terhadap penguasa atas hegemoni yang dilakukan. Pertentangan muncul karena perbedaan ideologi dan sudut pandang antar tokoh. Sedangkan kepatuhan timbul karena adanya kepentingan yang sama dan persamaan sudut pandang antar tokoh. Hegemoni terjadi antara kelas masyarakat politik dan masyarakat sipil terjadi secara paksa dan sukarela.

DAFTAR PUSTAKA

- Asri, T., & Irma, C. N. (2022). Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Puspabangsa Karya Karim Nas. *DIALEKTIKA Pendidikan Bahasa Indonesia*, 2(1), 112–132.
- Damono, S. D. (1978). *Sosiologi Sastra Sebuah Pengantar Ringkas*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Jakarta.
- Damono, S. D. (2020). *Sosiologi Sastra*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Dayanti, M., & Triadnyani, I. G. A. A. M. (2019). Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Surat-Surat dari Dili Karya Maria Matildis Banda. *Humanis*, 23(1), 74–80. <https://doi.org/10.24843/jh.2019.v23.i01.p12>
- Febrianto, D., & Rahma, C. W. P. (2020). Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Koplak Karya Oka Rusmini: Kajian Sosiologi Sastra. *KREDO: Jurnal Ilmiah Bahasa Dan Sastra*, 3(2), 204–219. <https://doi.org/10.24176/kredo.v3i2.4347>
- Geleuk, M. B. (2020). Bentuk-Bentuk Hegemoni Kekuasaan pada Tokoh Periferal dalam Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari. *DIGLOSIA: Jurnal Kajian Bahasa, Sastra, Dan Pengajarannya*, 3(1), 65–78.
- Harahap, M., Faruk, F., & Salam, A. (2019). Si Bulus-Bulus Si Rumbuk-Rumbuk sebagai Teks yang Hegemonik. *Atavisme*, 22(1), 88–100. <https://doi.org/10.24257/atavisme.v22i1.549.88-100>
- Imanda, M. S., & Rizal, M. S. (2022). Social Deviation In The Novel Entitled 86 By Okky Madasari: A Study Of The Sociology Of Literature. *UNCLLE: Undergraduate Conference on Language, Literature, and Culture*, 2(1), 203–211.
- Karuniawati, T. F., & Andalas, E. F. (2022). Ketimpangan Sosial dalam Novel Burung Berpagut Emas Karya M. Sjihirin. *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 7(2), 1–15. <https://doi.org/10.23917/kl.v7i2.13622>
- Kasmuri. (2017). Representasi Korupsi dalam Novel-Novel Indonesia Era Reformasi. *Humanis*, 9(2), 169–176.
- Khasanah, K. (2019). Hegemoni Kekuasaan dan Ideologi dalam Novel Pulang Karya Tere Liye (Sebuah

- Kajian Sosiologi Sastra). *Diskursus: Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 2(1), 35–48. <https://doi.org/10.30998/diskursus.v2i01.6661>
- Latifah, S., & Putra, C. R. W. (2020). Representasi Hegemoni Kekuasaan pada Zaman Kolonial dan Orde Baru dalam Novel Balada Supri. *Leksema: Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 5(1), 65–82. <https://doi.org/10.22515/ljbs.v5i1.2107>
- Madasari, O. (2017). 86. Jakarta: PT Gramedia Pustaka.
- Pane, S. W. (2022). Analisis Hegemoni Novel Sang Keris Karya Panji Sukma. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa Dan Pendidikan*, 2(4), 160–178.
- Patria, N., & Arief, A. (2015). *Antonio Gramsci Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rahmaniar, S., Amir, J., Jufri, & Thaba, A. (2021). Representasi Ideologi dan Kekuasaan Teks Berita Virus Corona. *JP-BSI: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 76–81.
- Rokhmansyah, A. (2019). Formasi Ideologi dalam Cerpen Tikus Karya Indra Tranggono. *Lingua*, 15(2), 146–153. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/lingua/article/view/16162>
- Sudiatmi, T., Muryati, S., & Wicaksana, M. F. (2022). Refleksi Rezim Orde Baru dalam Novel Entrok Karya Okky Madasari. *Klitika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(1), 67–72.
- Sugiarti, Andalas, E. F., & Setiawan, A. (2020). Desain Penelitian Kualitatif Sastra. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Suparmin, Saptomo, S. W., & Sukarno. (2022). Konsistensi Tata Tulis Karya Ilmiah Skripsi pada Program Studi PBSI FKIP Univet Bantara Sukoharjo. *Klitika: Jurnal Ilmiah Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 4(2), 97–110.
- Taufiqi, A. R., Kasnadi, & Astuti, C. W. (2021). Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Laut Bercerita Karya Leila S. Chudori. *LPPM STIKIP PONOROGO*, 8(1), 1–6.
- Urbaningrum, D. H., & Putra, C. R. W. (2020). The Power of Money Politic in the Novel Namaku Subardjo By Hapsari Anggarini: Perspective Hegemony Gramsci (Kekuasaan Money Politic dalam Novel Namaku Subardjo Karya Hapsari Hanggarini: Perspektif Hegemoni Gramsci). *Gramatika: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 6(2), 249–260. <https://doi.org/10.22202/jg.2020.v6i2.3858>
- Vidiyanti, M. O. (2018). Pergolakan Ideologi dalam Novel Terjemahan Yang Maha Kecil Karya Arundhati Roy: Kajian Hegemoni Gramsci. *Kandai*, 14(2), 257–268. <https://doi.org/10.26499/jk.v14i2.721>
- Wahyuni, P. (2019). Hegemoni Kekuasaan dalam Novel Hujan Karya Tere Liye dan Implikasinya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. *Jurnal Skripta*, 5(1). <https://doi.org/10.31316/skripta.v5i1.127>
- Yunita, G. F. R., & Putra, C. R. W. (2020). Representasi Hegemoni Kekuasaan Masyarakat Jawa dalam Novel Dasamuka Karya Junaedi Setiyono. *UNDAS: Jurnal Hasil Penelitian Bahasa Dan Sastra*, 16(2), 183–202.

<https://doi.org/10.26499/und.v16i2.2624>

Yunitasari, L., Merawati, F., & Hanifah, H. N. (2022). Elemen Solidaritas-Identitas Pembentuk Ideologi dalam Novel Karya Mahfud Ikhwan.

Imajeri: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia, 04(02), 203–214.

<https://doi.org/10.22236/imajeri.v4i2.8783>